

TANGGAPAN EKONOMI COVID-19

MANIFESTO PARA ANGGOTA PARLEMEN

Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang mengikutinya mengungkap kegagalan dan kerapuhan sistem ekonomi kita yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kesejahteraan rakyat dan lingkungan, memperdalam kesenjangan dan gagal melindungi mereka yang paling rentan.

Karenanya, adalah krusial bahwa kita menggunakan langkah-langkah yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 untuk melepaskan diri dari masa lalu dan bahkan beralih menuju sebuah perekonomian yang tangguh yang melindungi hak asasi manusia (HAM) semua orang.

Beralih ke ekonomi hijau yang mendorong pengerjaan (*employment*) yang layak, perlindungan sosial bagi semua, dan pasokan pangan yang berkelanjutan tidak hanya membantu kawasan ini lebih cepat menyerap dampak langsung resesi, tetapi, juga menghindar dari, dan menjadi lebih tangguh terhadap berbagai gejolak dan krisis serupa di masa depan.

Anggota Parlemen dapat memainkan peran yang signifikan dalam memastikan agar langkah-langkah yang ditujukan pada pemulihan ekonomi dari COVID-19 mengedepankan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memajukan, melindungi dan menghargai HAM.

Kami, anggota-anggota Parlemen dari Asia Tenggara, dengan ini bertekad menggunakan kedudukan kami untuk:

1. Mengedepankan sebuah perekonomian yang menjaga kenaikan suhu dunia kurang dari 1,5°C di akhir abad ini, di mana semua, termasuk generasi mendatang, dapat menikmati hak-hak asasi mereka tanpa cela dari perubahan iklim, polusi, deforestasi, limbah, dan degradasi lingkungan dengan:

1.1 Memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangani COVID-19 dan krisis ekonomi terkait tidak melemahkan, tapi justru menguatkan, berbagai langkah dan implementasi perlindungan lingkungan yang sudah ada;

1.2 Memasukkan dalam anggaran belanja stimulus bantuan langsung dan insentif finansial yang lebih besar bagi sistem energi terbarukan berikut infrastruktur dan teknologi *zero-emissions* sesuai dengan tujuan-tujuan dalam Perjanjian Paris;

1.3 Menetapkan syarat bagi bantuan ekonomi untuk sektor swasta, termasuk rantai pasokan mereka, agar segera menghasilkan penurunan tingkat polusi, emisi, limbah,

dan dampak lain yang merugikan lingkungan seturut dengan Perjanjian Paris serta standar internasional lain tentang lingkungan hidup dan HAM, dan;

1.4 Meningkatkan Rencana Aksi Nasional (*Nationally Determined Contributions*) untuk Perjanjian Paris guna menjamin kesesuaian dengan tujuan-tujuan Perjanjian Paris.

2. Mempercepat tumbuhnya perekonomian yang memberikan perlindungan sosial dan akses ke pelayanan publik bagi semua, termasuk di saat krisis dengan:

2.1. Memastikan langkah-langkah yang ditempuh baik sebagai tanggapan atas mau pun untuk melindungi orang dari dampak pandemi COVID-19 mempertimbangkan berbagai akibat atas mereka yang paling terpinggirkan dan terdampak termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perempuan, kaum migran, kelompok LGBTQIA, penyandang disabilitas, pencari suaka dan pengungsi, masyarakat adat, petani gurem, etnik minoritas dan kelompok minoritas lain, serta mereka yang bekerja di sektor informal;

2.2. Menyesuaikan, memperluas, dan meningkatkan skema perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, pengungsi dan pekerja migran, serta mereka yang saat ini belum termasuk, dan;

2.3. Memastikan akses yang terjangkau dan terus menerus bagi semua pada pelayanan publik tentang kesehatan, pendidikan, perhubungan, air, perumahan dan sebagainya, termasuk selama masa krisis dan tanpa diskriminasi.

3. Mempercepat tumbuhnya perekonomian yang membuka peluang lebih besar untuk pengerjaan yang layak, berkelanjutan dan aman bagi semua, di mana pekerja, baik formal mau pun informal, terlindungi secara memadai dengan:

3.1. Menetapkan bantuan ekonomi untuk sektor swasta diberikan dengan langkah-langkah yang memastikan:

- Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya memperhatikan HAM, termasuk kegiatan lintas batas negara;
- Penerapan dan perlindungan yang memadai hak-hak pekerja internasional, termasuk kondisi dan upah kerja yang layak, hak atas tempat kerja yang aman, kebebasan pekerja untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk berunding dan bermusyawarah (*collective bargaining*);
- Kesetaraan gender dalam perekrutan dan peluang pengerjaan serta upah dan promosi yang non-diskriminatif, dan;
- Retensi pekerja, akses pada pelatihan dan berbagai peluang peningkatan pengerjaan.

3. 2. Mengambil berbagai langkah yang memastikan para pekerja informal, migran, perempuan pekerja, LGBTQIA, pekerja dengan disabilitas dan kelompok-kelompok

lain tidak menderita dampak-dampak disproportional akibat krisis yang disebabkan oleh majikan atau lainnya;

3. 3. Langkah-langkah prioritas yang mendukung dan mendorong pendapatan dan pekerjaan (*employment*) dengan:

- Berinvestasi dalam penciptaan peluang-peluang pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak
- Mengarahkan langkah-langkah dukungan pada UMKM dengan cara yang konsisten dengan perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Memajukan perekonomian yang mampu menjamin akses yang terjangkau pada pangan yang bergizi dan bahan pokok lain secara berkelanjutan dan tepat budaya bagi semua dengan:

4.1. Mendukung langkah-langkah menuju meningkatnya swasembada pangan dan produksi pangan serta bahan pokok lain yang tersedia di tingkat lokal secara ekologis dan berkelanjutan;

4.2. Menyesuaikan, meluaskan, dan meningkatkan kualitas pangan dan program-program bantuan bahan pokok lain bagi semua dengan harga yang wajar, dan;

4.3. Memastikan perjanjian perdagangan internasional dan kawasan tidak mengancam akses yang terjangkau ke kesehatan, pangan yang terjangkau, berkelanjutan dan tepat budaya, dan bahan-bahan pokok lain selama krisis.

5. Bertekad memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut di atas dan langkah-langkahnya dirancang dan diterapkan dengan partisipasi bermanfaat dari semua sektor masyarakat;

6. Menyerukan kepada pemerintah agar mempertimbangkan pembiayaan langkah-langkah ini melalui realokasi anggaran dari kementerian/lembaga yang tidak berperan langsung dalam penanganan wabah, seperti pertahanan-keamanan, ke kementerian/lembaga yang berperan langsung, dan melalui baik sumbangan suka rela mau pun perpajakan dari orang perorang dan perusahaan yang paling berada.

7. Mengundang semua pelaku bergabung demi mencapai tujuan-tujuan ini.